

TREN PENANGANAN KASUS KORUPSI

Tahun 2015

INDONESIA CORRUPTION WATCH
JAKARTA



TUJUAN

- Melakukan pemetaan atas kasus korupsi yang disidik oleh Aparat Penegak Hukum pada tahun 2015, meliputi : jumlah kasus korupsi, total nilai kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan, sektor korupsi terjadi, jabatan pelaku.
- Monitoring dan menganalisis kinerja Aparat Penegak Hukum dalam menyidik Kasus korupsi tahun 2010 hingga 2014.

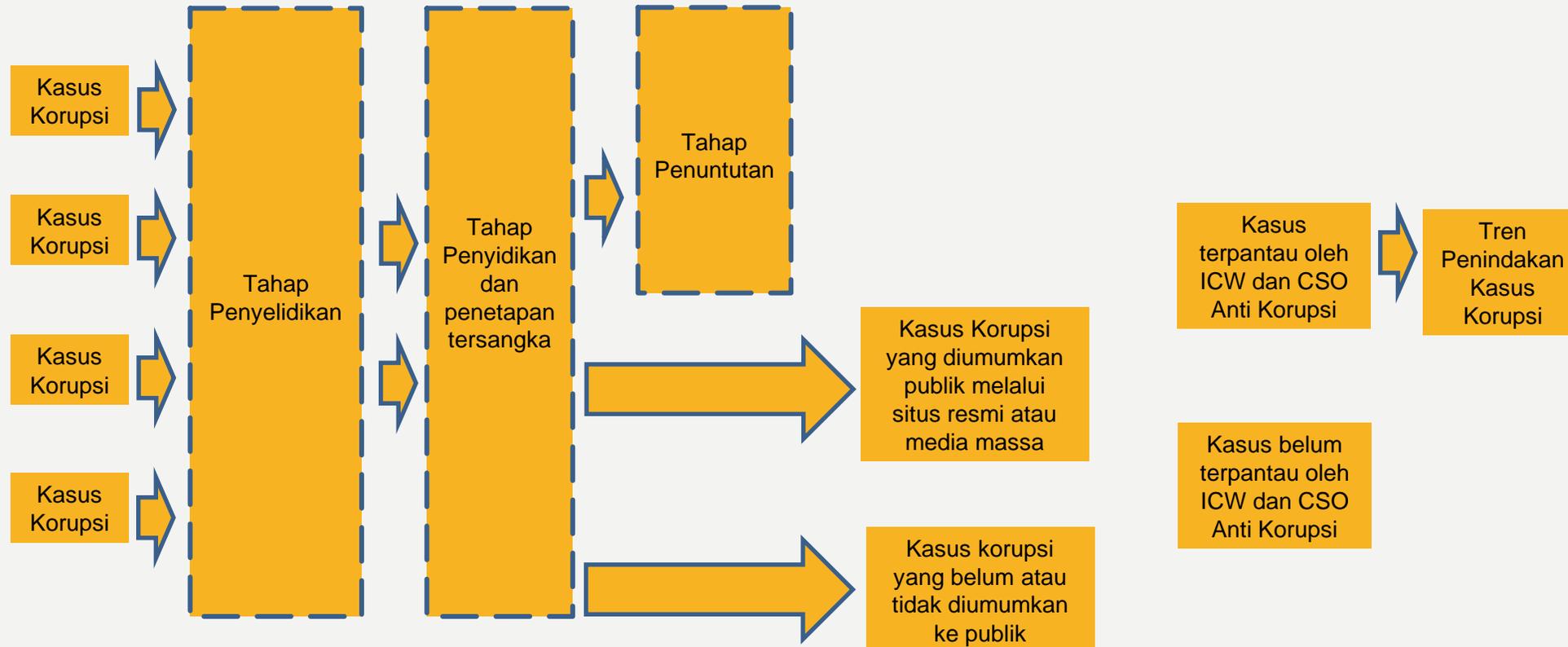
METODOLOGI

- Melakukan pemantauan kasus korupsi di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka.
- Kasus korupsi yang telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau melalui media massa.
- Melakukan tabulasi atas kasus – kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW.
- Membandingkan statistik jumlah kasus dan kerugian negara serta penyuaapan berdasarkan tahun.
- Melakukan analisis deskriptif atas kinerja penyidikan Kasus korupsi.

SUMBER DATA & WAKTU PEMANTAUAN

- Website resmi Institusi Penegak Hukum
- Media Online dan Cetak
- Periode : 1 Juli – 31 Desember

BAGAN SUMBER DATA TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI





TEMUAN

SISTEMATIKA PENYAJIAN TEMUAN :



- I.
 - Profil Kasus Korupsi 2015 yang Masuk Tahap Penyidikan Dan Penetapan Tersangka

- II.
 - Tren Penindakan Kasus Korupsi 2010-2015

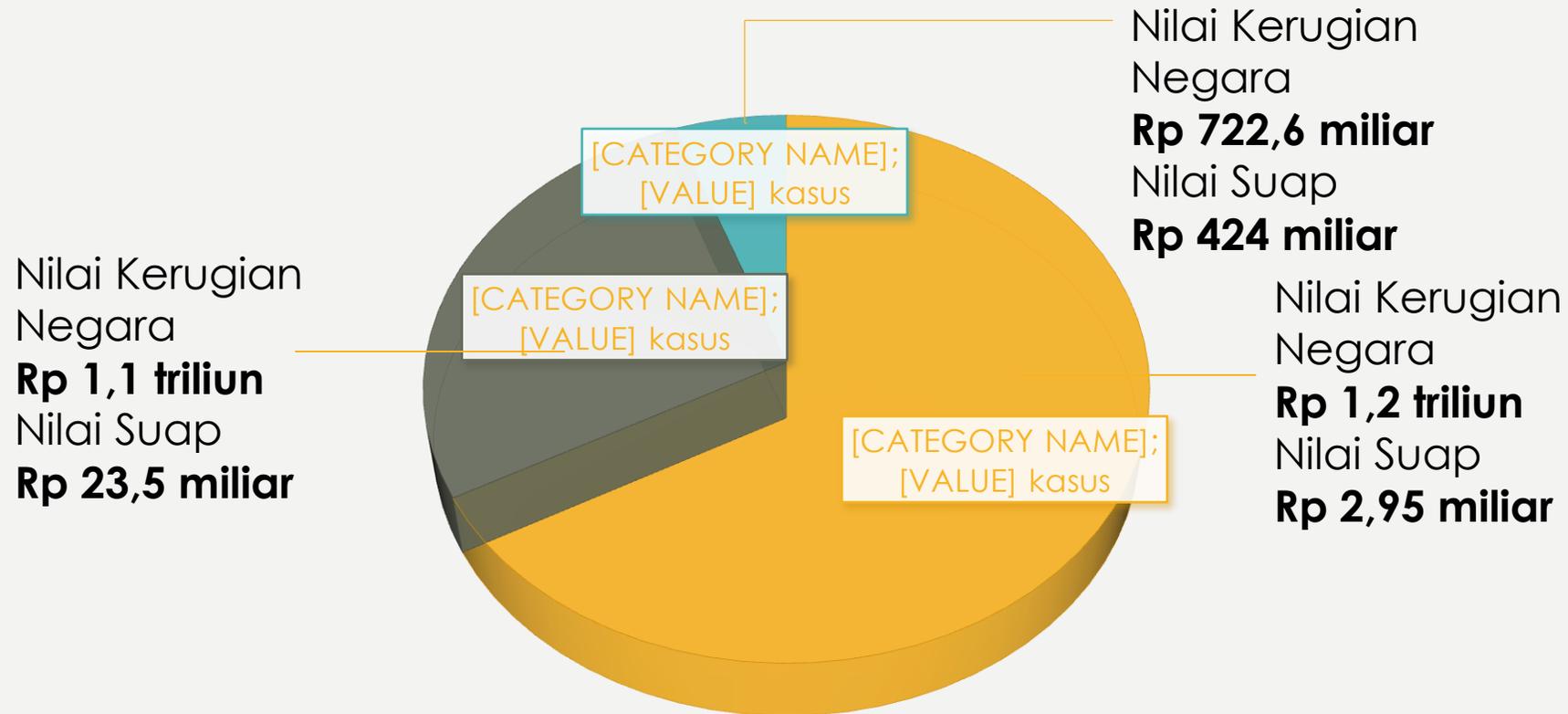
- III.
 - Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi APH

PROFIL KASUS KORUPSI TAHAP PENYIDIKAN SELAMA TAHUN 2015

Keterangan	Semester I	Semester II	TOTAL
Jumlah Kasus	308	242	550
Jumlah Tersangka	590	534	1.124
Nilai Kerugian Negara (Miliar Rupiah)	1.230	1.820	3.107,7
Nilai Suap (Miliar Rupiah)	468	32	450,5

- Jumlah kasus menurun pada semester 2, namun nilai kerugian negara cenderung meningkat
- Penegak Hukum banyak menangani kasus yang nilai kerugian negaranya besar pada semester 2

PENANGANAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN APARAT PENEGAK HUKUM TAHUN 2015



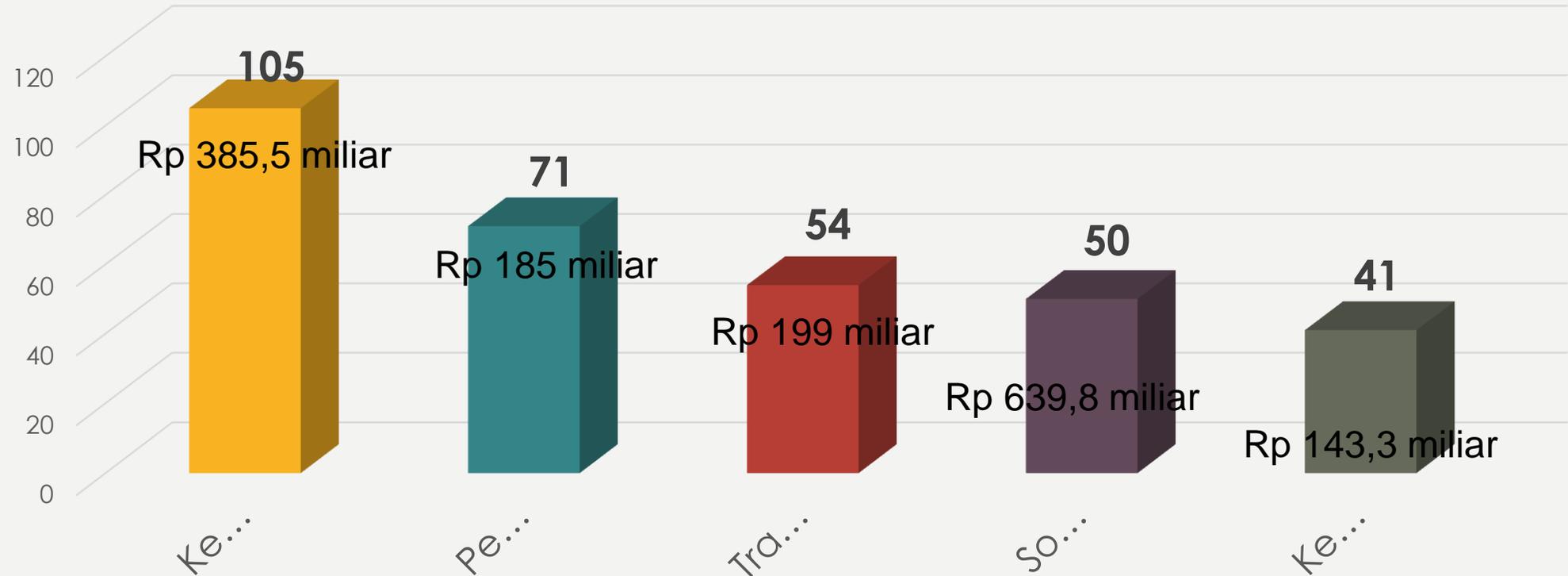
- Kejaksanaan pada tahun 2015 menangani sebanyak 369 atau sekitar 67,4 persen kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan total nilai kerugian negara yang berhasil dihitung sebanyak Rp 1,2 triliun.
- Kepolisian pada tahun 2015 hanya menangani sebanyak 151 atau sekitar 27 persen dari total keseluruhan kasus korupsi yang ditangani oleh APH.
- KPK pada tahun 2015 menangani sebbanyak 30 atau sekitar 5 persen kasus korupsi di Indonesia.
- **Upaya yang dilakukan oleh DPR dengan memangkas kewenangan KPK terkait dengan penyadapan dapat dibantahkan dengan melihat bahwa selama ini kerja – kerja KPK lebih efektif ketika Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini dapat dilihat bahwa nilai suap yang dapat diungkap oleh KPK lebih besar dibandingkan penegak hukum lain.**

KETERANGAN	JUMLAH KASUS	NILAI KERUGIAN NEGARA (Miliar Rupiah)	NILAI SUAP (Miliar Rupiah)
Penggelapan	107	412,4	
Penyalahgunaan Anggaran	134	803,3	
Mark Up	104	455	
Penyalahgunaan Wewenang	102	991,8	
Kegiatan / Proyek Fiktif	20	94,9	
Mark Down	5	1,7	
Laporan Fiktif	29	280,2	
Suap / Gratifikasi	24		612,2
Penyunatan / Pemo tongan	15	12,3	
Pemerasan	6	54,6	
Anggaran Ganda	1	0,14	
Pungutan Liar	3	0,12	
TOTAL	550	3.107	612,2

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2015 BERDASARKAN MODUS

- Modus kasus paling banyak adalah penyalahgunaan anggaran sekitar 24 persen atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian negara sebesar Rp 803,3 miliar.
- Salah satu kasus yang terjadi adalah korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis. Ia merugikan negara sekitar Rp 29 miliar.

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2015 BERDASARKAN SEKTOR (5 TERBANYAK)



- Korupsi lebih banyak terjadi di sektor keuangan daerah dengan 105 kasus korupsi dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 385,5 miliar.
- Sektor pelayanan publik pada tahun 2015 menjadi sektor yang paling rentan untuk dikorupsi. Hal ini terbukti ketika korupsi terjadi di sektor pendidikan, transportasi dan kesehatan masuk dalam kategori 5 (lima) terbanyak.

KETERANGAN	JUMLAH Kasus	NILAI KERUGIAN NEGARA (Miliar Rupiah)	NILAI SUAP (Miliar Rupiah)
Jawa Timur	54	332,3	2,4
Sumatera Utara	43	206,9	0,5
Jawa Barat	32	72,1	
NTT	30	26,9	
Jawa Tengah	28	98	0,05
Riau	22	323,3	2,8
Lampung	22	14,9	
Sulawesi Selatan	21	94,2	22,5
Sumatera Selatan	20	41,2	4,8
Sumatera Barat	19	45,2	

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2015 BERDASARKAN PROVINSI (10 TERBESAR)

- Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak kasus korupsi yang disidik, sebanyak 54 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 332,3 miliar.
- Kasus korupsi banyak disidik di Pulau Sumatera. Dari 10 Provinsi, sebanyak 5 Provinsi masuk dalam kategori Provinsi terbanyak yang disidik terkait dengan kasus korupsi.

*Tabel ini tidak menunjukkan peringkat korupsi provinsi

JABATAN TERSANGKA KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN TAHUN 2015 (5 JABATAN TERBANYAK)



- Aktor yang paling banyak ditindak pada tahun 2015 adalah pejabat atau pegawai pemda / kementerian sebanyak 379 orang.
- Aktor yang paling banyak setelah pegawai pemda adalah direktur, komisaris, konsultan dan pegawai swasta sebanyak 195 orang.

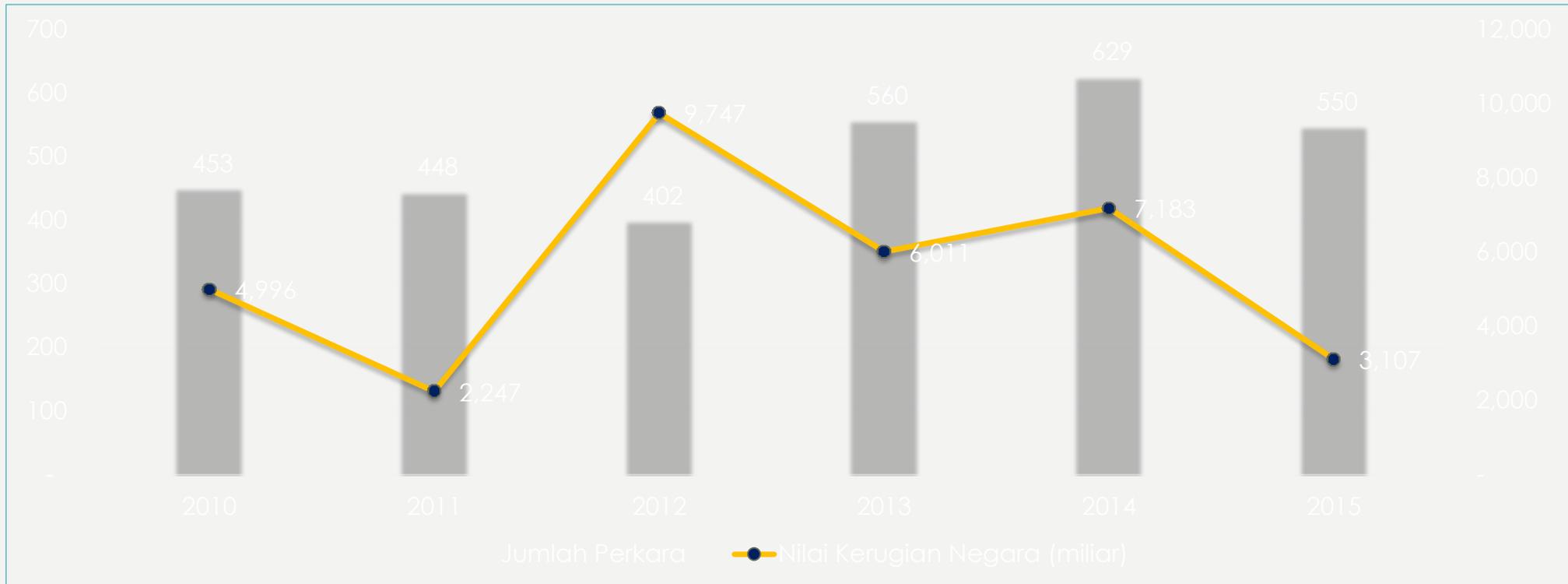
TREN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI 2010-2015

TOTAL KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN 2010-2015

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Nilai Kerugian Negara (Miliar Rupiah)	Nilai Suap (Miliar Rupiah)
2010	453	1.007	4.996,7	27,7
2011	448	1.090	2.247,2	19,5
2012	402	895	9.747,3	37,9
2013	560	1.282	6.011,2	389,4
2014	629	1.335	7.183,4	74,4
2015	550	1.124	3.107,7	450,5
TOTAL	3.042	6.733	33.293,8	999,6

- Total kasus korupsi yang berhasil dipantau oleh ICW dan masuk dalam tahap penyidikan selama tahun 2010 hingga 2015 sebanyak 3.042 kasus dengan total tersangka sebanyak 6.733 orang. Sedangkan total nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 33,2 triliun dan nilai suap sebesar 999,6 miliar.
- Adanya penurunan penanganan kasus korupsi pada tahun 2012 dan 2015. Khusus tahun 2015, penurunan diduga disebabkan karena kriminalisasi yang terjadi di KPKi

TREN JUMLAH DAN KERUGIAN NEGARA KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN SELAMA 2010 – 2015 BERDASARKAN TAHUN



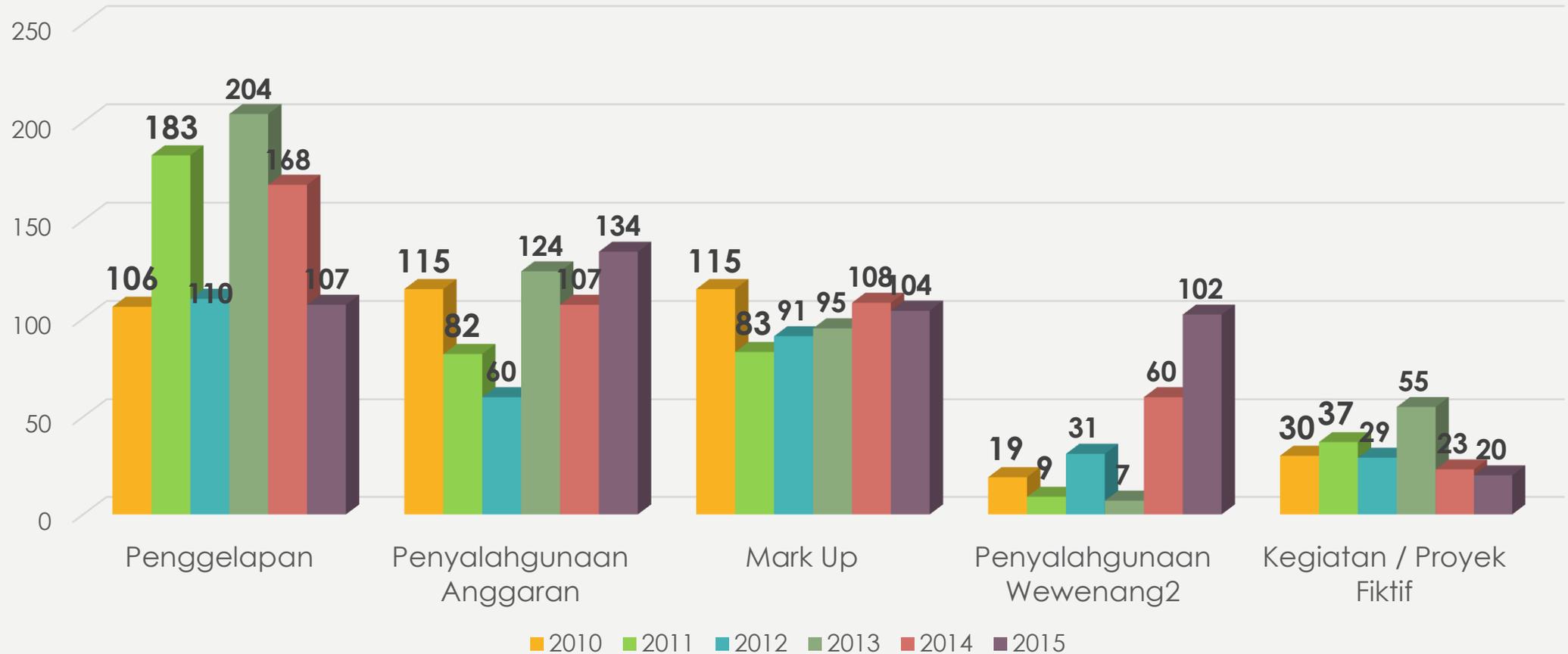
- Terdapat tren meningkat dalam jumlah kasus korupsi tiap tahunnya.
- Tidak terdapat tren (menurun atau meningkat) dalam aspek jumlah kerugian negara.
- Hal ini menunjukkan penegak hukum banyak menangani Kasus korupsi yang kualitas sedang dan rendah (*middle lower*). Seharusnya APH meampu menyidik kasus "big fish" dengan kerugian negara besar dan aktor pejabat tinggi seperti anggota DPR, mantan menteri dan

KETERANGAN	JUMLAH KASUS	NILAI KERUGIAN NEGARA	NILAI SUAP
Penggelapan	878	17.773	3,6
Penyalahgunaan Anggaran	622	4.297	0,8
Mark Up	596	3.264	381
Penyalahgunaan Wewenang	228	4.634	
Kegiatan / Proyek Fiktif	194	1.218	2
Mark Down	19	133	-
Laporan Fiktif	176	924	-
Suap / Gratifikasi	144		612,2
Penyunatan / Pemoangan	90	115,5	-
Pemerasan	13	56,4	-
Anggaran Ganda	12	15,9	-
Pungutan Liar	46	133,3	-
TOTAL	3.042	33.293	999,6

TOTAL KASUS KORUPSI BERDASARKAN MODUS YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA 2010 HINGGA 2015

- Modus yang sering dilakukan selama 2010 hingga 2015 adalah penggelapan dengan total kasus sebanyak 878 atau sekitar 28 persen. Kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 17,7 triliun.
- Salah satu modus penggelapan yang nilai kerugian negara paling besar adalah Korupsi penggunaan jaringan 3G frekuensi radio 2,1 GHz sebesar Rp 1,3 triliun. Terpidana korupsi jaringan 3G adalah Indar Atmanto selaku Dirut IM2.

TREN KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN BERDASARKAN MODUS SELAMA 2010 HINGGA 2015 (5 TERATAS)



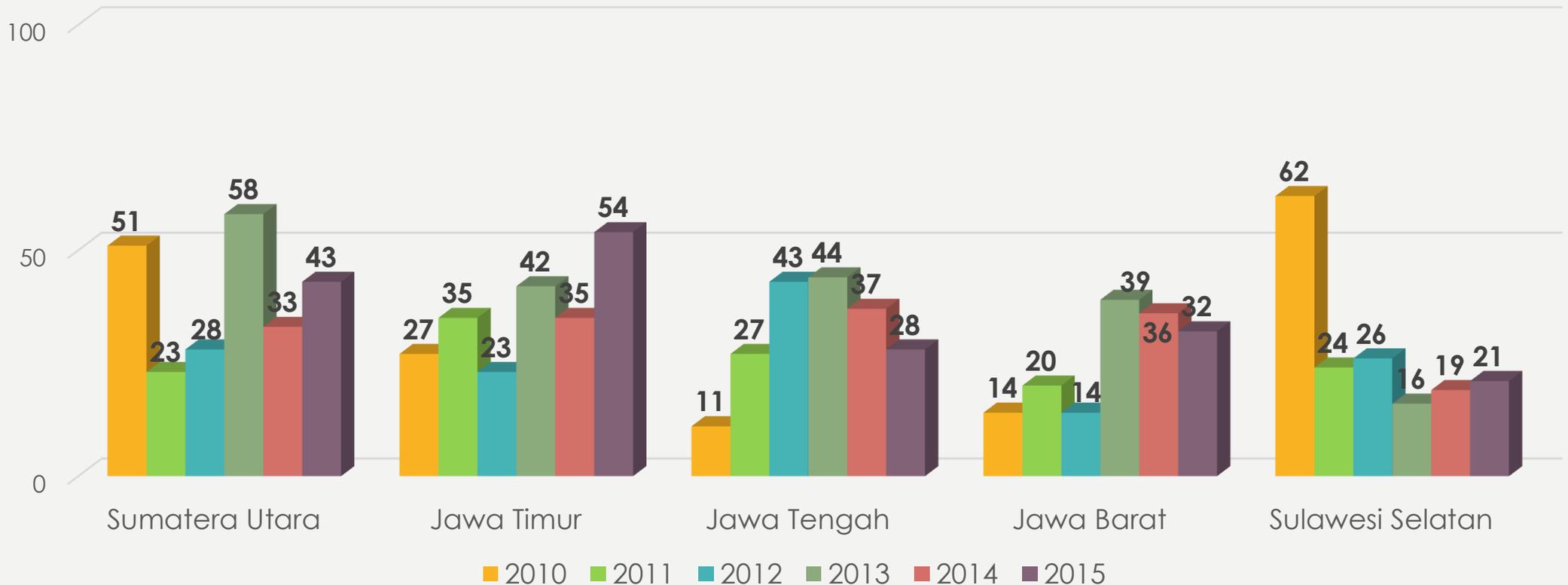
1. Tren modus Penggelapan cenderung naik
2. Tren modus Penyalahgunaan anggaran mulai naik signifikan
3. Tren modus Mark Up cenderung stagnan
4. Tren modus Penyalahgunaan Wewenang naik signifikan
5. Tren modus Kegiatan / Proyek Fiktif cenderung menurun

TOTAL KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2010 HINGGA 2015 BERDASARKAN PROVINSI (10 TERBESAR)

KETERANGAN	JUMLAH KASUS	NILAI KERUGIAN NEGARA (Miliar Rupiah)	NILAI SUAP (Miliar Rupiah)
Sumatera Utara	236	2.090	3,2
Jawa Timur	216	934,3	8
Jawa Tengah	190	716,6	1,9
Sulawesi Selatan	168	560,2	248
Jawa Barat	155	740,4	56
Riau	132	3.935	40,8
NTT	131	347	
Aceh	130	1.743	0,3
Jambi	110	289,9	0,255
Sumatera barat	92	258,6	

- Korupsi paling banyak disidik di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 236 kasus dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 2.09 triliun.
- Meski APH Sumut banyak menyidik kasus korupsi namun kasus korupsi yang mangkrak justru banyak di provinsi ini

TREN KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2010 HINGGA 2015 BERDASARKAN PROVINSI (5 TERATAS)



1. Tren kasus korupsi di Sumatera utara cenderung naik.
2. Tren kasus korupsi di Jawa Timur naik signifikan.
3. Tren kasus korupsi di Jawa Tengah naik signifikan.
4. Tren kasus korupsi di Jawa Barat naik signifikan.
5. Tren kasus korupsi di Sulawesi Selatan menurun signifikan

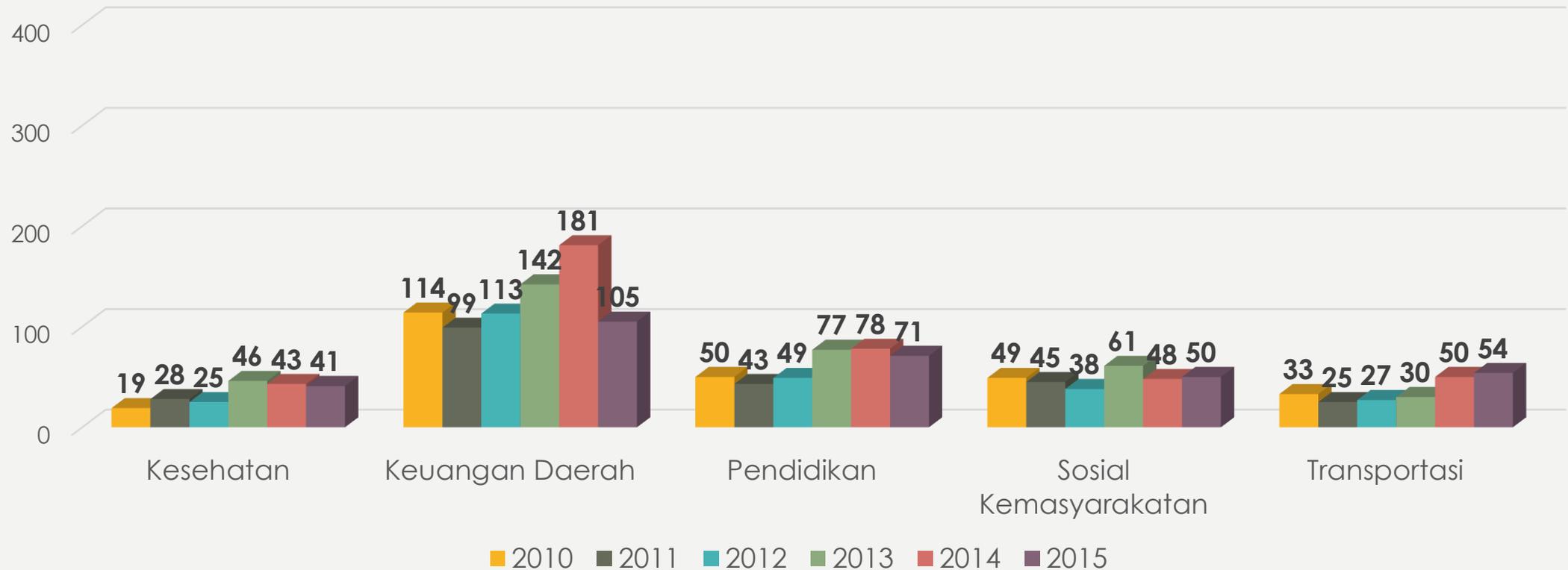
*Catatan : Statistik ini tidak menunjukkan bahwa daerah paling

TOTAL KASUS KORUPSI 2010 HINGGA 2015 BERDASARKAN SEKTOR (10 TERBESAR)

KETERANGAN	JUMLAH KASUS	NILAI KERUGIAN NEGARA (Miliar Rupiah)	NILAI SUAP (Miliar Rupiah)
Keuangan Daerah	754	5.001	95,6
Pendidikan	368	1.302,3	386,6
Sosial Kemasyarakatan	291	2.164	-
Transportasi	219	733,9	11
Kesehatan	202	975,4	-
Pertanian / Perkebunan	115	581,3	-
Pertanahan	109	671,7	1,1
Pengairan	99	1.125,5	1,9
Pemerintahan	90	197	395,9
Energi dan Listrik	80	875,3	13,8

- Korupsi paling banyak disidik APH dalam periode ini adalah kasus korupsi di sektor keuangan daerah yakni, sebanyak 754 kasus atau sekitar 24 persen dari total keseluruhan. Kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 5 triliun.
- Sementara, sektor pelayanan publik (Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan, Transportasi dan Kesehatan) masih menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi selama 2010 hingga 2015. Kasus yang terjadi pada sektor pelayanan publik sebanyak 1.080 kasus atau sekitar 25,5 persen.

TREN KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN BERDASARKAN SEKTOR TAHUN 2010 HINGGA 2015 (5 SEKTOR TERATAS)



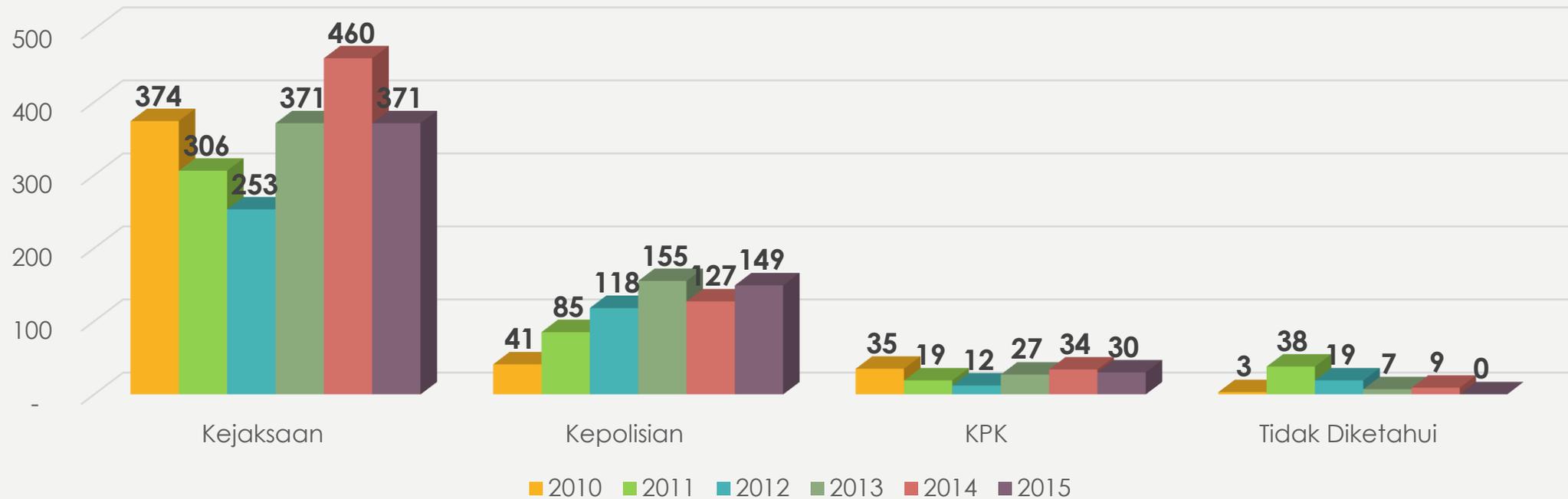
1. Kasus korupsi pada sektor kesehatan cenderung naik
2. Kasus korupsi pada sektor Keuangan Daerah cenderung naik
3. Kasus korupsi pada sektor pendidikan naik signifikan
4. Kasus korupsi pada sektor Sosial Kemasyarakatan stagnan
5. Kasus korupsi pada sektor Transportasi naik signifikan.

TOTAL KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN 2010-2015 BERDASARKAN APARAT PENEGAK HUKUM

Tahun	Kejaksaan	Kepolisian	KPK	Tidak Diketahui	TOTAL
2010	370	45	35	3	453
2011	306	85	19	38	448
2012	248	123	12	19	402
2013	371	155	27	7	560
2014	460	127	33	9	629
2015	369	151	30	0	550
TOTAL	2.124	686	156	76	3.042

- Total kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan sebanyak 2.124 kasus atau sekitar 69 persen lebih banyak dari Kepolisian dan KPK. Nilai kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp 13,9 triliun.
- Total kasus korupsi yang ditangani KPK sebanyak 156 kasus atau sekitar 5 persen. Namun nilai kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp 13,2 triliun hamper setara dengan nilai kerugian negara yang berhasil dihitung oleh Kejaksaan.

TREN PENANGANAN KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN BERDASARKAN APARAT PENEGAK HUKUM TAHUN 2010 HINGGA 2015



- Tren penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan cenderung meningkat mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2015.
- Tren penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian cenderung meningkat mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2015.
- Tren penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK cenderung stagnan mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2015

KINERJA PENYIDIKAN KASUS KORUPSI APH SELAMA TAHUN 2010 HINGGA 2014

KETERANGAN	JUMLAH KASUS	JUMLAH NILAI KERUGIAN NEGARA (Miliar Rupiah)	JUMLAH NILAI SUAP (Miliar Rupiah)
Ada perkembangan	1.940	24.512,8	520,4
Belum ada perkembangan	410	4.309	3,5
Tidak ada informasi	142	1.364,2	25,1
TOTAL	2.492	30.186	549,1

- Total kasus yang berhasil dipantau oleh ICW selama tahun 2010 hingga 2014 sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar.
- Ada sekitar 552 kasus atau sekitar 22 persen yang tidak jelas perkembangannya, apakah sudah masuk tahap penuntutan atau masih dalam proses penyidikan.

Perkembangan Semester 1

Perkembangan Semester 2

Kasus korupsi pada semester 1 2015 :

308 kasus baru masuk penyidikan

Kasus korupsi pada semester 2 2015 :

342 kasus baru masuk penyidikan

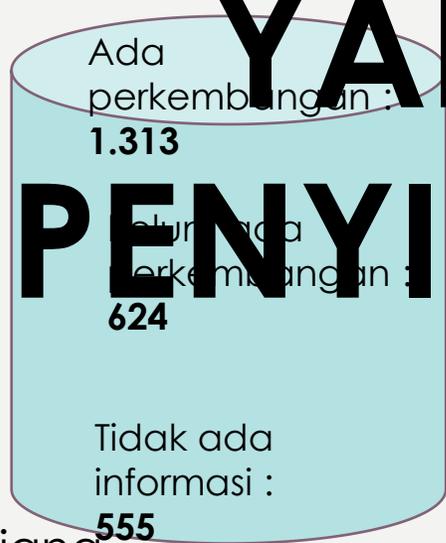
TOTAL KASUS KORUPSI

YANG MASUK TAHAP

PENYIDIKAN PERIODE 2010

- 2015 :

2.492



Bejana penyidikan semester I/2015

Kasus yang sudah ada perkembangan

Kasus yang sudah ada perkembangan

Dari 1.179 kasus yang mangkrak (belum ada perkembangan dan tidak ada informasi perkembangan) pada semester 1 2015 jumlahnya berkurang dari 1.179 kasus menjadi 652 kasus pada semester 2 2015 atau 55,3 persen dari total kasus mangkrak tersebut.

Inilah kinerja penyidikan kasus korupsi APH (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) selama semester 2 2015

MONITORING KINERJA PENANGANAN KASUS KORUPSI SELAMA TAHUN 2010 HINGGA 2014 BERDASARKAN

APH

PEMANTAUAN SEMESTER 1 2015

PEMANTAUAN SEMESTER 2 2015

TOTAL KASUS : 1.313

Ada Perkembangan

Kejaksaan : 934
Kepolisian : 271
KPK : 72
Tidak diketahui : 36

TOTAL KASUS : 624

Belum ada Perkembangan

Kejaksaan : 464
Kepolisian : 136
KPK : 14
Tidak diketahui : 10

Kinerja penyidikan Kasus Korupsi tahun 2010-2014 sebanyak 2.492 kasus

Tidak ada informasi

TOTAL KASUS : 555

Kejaksaan : 371
Kepolisian : 114
KPK : 40
Tidak diketahui : 30

PEMANTAUAN SEMESTER 2 2015

TOTAL KASUS : 214

Ada Perkembangan

Kejaksaan : 153
Kepolisian : 48
KPK : 12
Tidak diketahui : 1

TOTAL KASUS : 410

Belum Ada Perkembangan

Kejaksaan : 311
Kepolisian : 88
KPK : 2
Tidak diketahui : 9

TOTAL KASUS : 413

Ada Perkembangan

Kejaksaan : 291
Kepolisian : 74
KPK : 38
Tidak diketahui : 10

TOTAL KASUS : 142

Tidak ada informasi

Kejaksaan : 80
Kepolisian : 40
KPK : 2
Tidak diketahui : 20

Ada Perkembangan	Belum Ada Perkembangan
Kejaksaan : 1.378	Kejaksaan : 311
Kepolisian : 393	Kepolisian : 88
KPK : 122	KPK : 2
Tidak diketahui : 47	Tidak diketahui : 9

TOTAL : 1.940

TOTAL : 410

Tidak Ada Informasi

Kejaksaan : 80
Kepolisian : 40
KPK : 2
Tidak diketahui : 20

TOTAL : 142

5 KEJATI YANG MENANGANI KASUS KORUPSI TIDAK JELAS PERKEMBANGANNYA PADA SEMESTER II 2015:

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Miliar Rupiah)
1.	Kejati Sulawesi Selatan	35	32,9
2.	Kejati Sumatera Utara	21	1.019,9
3.	Kejati Jawa Barat	20	203
4.	Kejati Jawa Timur	20	31
5.	Kejati Jawa Tengah	20	115,9

1. Kejati Sulselbar masih memiliki 35 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan namun tidak memiliki informasi perkembangan perkara (masuk tahap penuntutan). Kerugian negara dari kasus ini sekitar Rp 32,9 miliar.
2. Urutan kedua adalah Kejati Sumut yang memiliki tunggakan perkara sebanyak 21 kasus dengan kerugian negara Rp 1 triliun
3. Urutan ketiga sampai kelima diikuti oleh Kejati Jabar, Jatim dan Jateng masing-masing dengan 20 tunggakan kasus. Kerugian negara dari kasus bervariasi masing-masing

5 POLDA YANG MENANGANI KASUS KORUPSI TIDAK JELAS PERKEMBANGANNYA PERKEMBANGANNYA PADA SEMESTER II 2015

No.	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Miliar Rupiah)
1.	Polda Jawa Timur	11	5,8
2.	Polda Aceh	10	33,8
3.	Polda Sulawesi Selatan	9	6,4
4.	Polda Jawa Barat	7	10,4
5.	Polda Papua	7	4,7

Polda Jatim memiliki tunggakan perkara paling banyak yakni sekitar 11 kasus kemudian diikuti oleh Polda Aceh, Sulselbar, Jabar dan Papua masing-masing berturut adalah 10, 9, 7, dan 7 kasus.

Kerugian negara atas kasus ini paling tinggi dimiliki oleh polda Aceh sebesar Rp 33,8 miliar. Kemudian diikuti oleh Polda Jabar Rp 10,4 miliar.

KESIMPULAN

1. Jumlah kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan selalu meningkat tiap tahunnya kecuali di tahun 2015 yang menurun meskipun jumlahnya tidak signifikan.
2. Meskipun jumlah kasus yang disidik meningkat namun ada kecenderungan juga kualitas menurun terutama jika dilihat dari aktor/ pelaku yang terjerat maupun dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
3. Penindakan kasus korupsi masih menasar pelaku (tersangka) dari jabatan menengah bawah (middle lower) masih belum banyak menyeret dari pelaku dengan jabatan menengah atas (middle upper) seperti mantan menteri, anggota DPR/Parpol, pengusaha nasional atau mantan pejabat negara. Sedangkan dari menurunnya kerugian negara karena dipengaruhi faktor pelemahan KPK. KPK selama ini menyumbang 1/3 total kerugian negara.
4. Modus kasus korupsi terbanyak pada tahun 2015 adalah kasus dengan modus penyalahgunaan anggaran. Namun, dari total kasus 2010-2015 modus terbanyak adalah penggelapan sebanyak 878 kasus dengan kerugian negara Rp 17,8 triliun. Kasus dengan tren penggelapan cenderung naik begitu juga dengan penyalahgunaan anggaran juga cenderung naik. Yang menarik adalah naiknya kasus korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan. Modus ini mengalami kenaikan jauh lebih tajam dibanding dengan modus korupsi lainnya.

KESIMPULAN

4. Jatim merupakan provinsi dimana APH nya menyidik kasus korupsi terbanyak pada tahun 2015. APH diprovinsi menyidik 54 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 332,3 miliar pada tahun ini. Namun, berdasarkan total kasus yang disidik APH dari 2010-2015, APH di Jatim menempati urutan kedua dalam menanganani banyaknya kasus korupsi. Jatim menyidik 216 kasus dengan kerugian negara Rp 934,3 miliar. Sementara, APH provinsi terbanyak menyidik kasus korupsi pada periode 2010-2015 adalah Sumut dengan jumlah kasus 236 dan kerugian negara Rp 2 triliun. Sementara itu terdapat tren cenderung naik di provinsi sumatera utara dan menaik signifikan di Jatim untuk pengamatan pertahun.
5. Sektor keuangan daerah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam kasus korupsi yang disidik APH pada tahun 2015. Pada tahun ini, terdapat 105 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 385,5 miliar yang terdapat pada sektor ini dan disidik oleh APH. Pola yang sama juga terjadi dalam total kasus yang ditangani penyidik dalam periode 2010-2015 dimana Keuangan Daerah merupakan sektor penyumbang kasus terbesar. Pendidikan adalah sektor kedua terbanyak menyumbang kasus korupsi terbesar dengan total kasus 368 kasus dan kerugian negara Rp 1,3 triliun. Sementara analisis tren pertahun diketahui bahwa penyidikan kasus korupsi sektor keuangan daerah naik signifikan dan pendidikan naik secara

KESIMPULAN

6. Hasil pemantauan semester I 2015 terdapat 1.179 kasus yang mangkrak pada tahap penyidikan. Jumlahnya berkurang menjadi 652 kasus pada semester 2. Dengan demikian, presentase kasus mangkrak adalah 55,3 persen. Dengan demikian kinerja APH (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dalam menuntaskan kasus korupsi selama semester 2 2015 baru sekitar 44,7 persen (100 persen-55,3 persen). APH masih memiliki banyak tunggakan perkara korupsi yang harus dinaikkan statusnya dari penyidikan ke penuntutan.

TERIMAKASIH